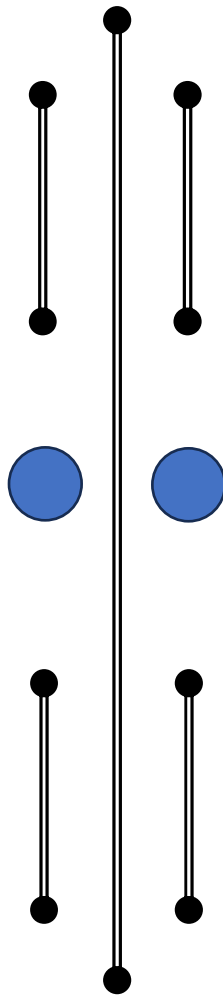




LAPORAN KINERJA



DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Kinerja Dinas diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya.

Ruteng, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai,



BENYAMIN SAN, SH

PEMBINA

NIP. 19690607 200604 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

1. Data Umum Organisasi
2. Aspek Strategis Organisasi / Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Struktur Organisasi
4. Sistematika Penyajian LAKIP

BAB II. PERENCANAAN

Rencana Strategis 2021 - 2026

- a. Visi
- b. Misi
- c. Tujuan, Sasaran Strategis dan Program
- d. Rencana Kinerja Tahunan
- e. Perjanjian Kinerja Tahunan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Uraian Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategis Peningkatan Kinerja
- C. Uraian Ringkas Strategis Pemecahan Masalah

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja 2024
3. IKU
4. Pengukuran Kinerja
5. Monev Renaksi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Tujuan Rencana Strategis : **MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT**, dengan sasaran : **MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**. Bahwa dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, dalam Rencana Kerja Tahunan untuk tahun 2024, telah ditetapkan target penanganan PMKS sebesar 18.059 orang dari total keseluruhan PMKS sebanyak 600.000 orang, atau sebesar 3,1%.

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2024
1	2	3
<u>TUJUAN:</u> MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	ANGKA	18.059
<u>SASARAN:</u> MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	PERSENTASE	3,1%

Sedangkan realisasi penanganan PMKS pada tahun 2024 dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2024
1	2	3
<u>TUJUAN:</u> MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	ANGKA	5.351
<u>SASARAN:</u> MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	PERSENTASE	0,29%

NO	JENIS PMKS & PSKS	JUMLAH	SUMBER DANA	KET
1.	Lanjut Usia / Lansia	67 Orang	APBD II	PMKS
2.	Disabilitas	174 Orang	APBD II	PMKS
3.	Warsosek	3 Keluarga	APBD II	PMKS
4.	Karang Taruna	3 Lembaga	APBD II	PSKS
5.	Bencana Alam / Sosial	5.104 Orang	APBD I dan APBD II	PMKS
TOTAL		5.351		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Manggarai hanya memiliki 1 (satu) tujuan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai. Meskipun

demikian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian target ini antara lainnya, seperti:

1. Jumlah korban Bencana Alam maupun Bencana Sosial yang tidak bisa diprediksi;
2. Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya kesiap siagaan terhadap bencana;
3. Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lain yang belum dijangkau;
4. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di masyarakat;

Dalam pencapaian tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu menentukan strategi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dalam bentuk barang, serta dukungan anggaran yang maksimal untuk mencapai solusi yang tepat antara lain:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang bisa mendukung peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Masyarakat;
2. Sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya kesiap siagaan terhadap Bencana Alam maupun Bencana Sosial.

BAB I. PENDAHULUAN

1. Data Umum Organisasi
2. Aspek Strategis Organisasi / Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Struktur Organisasi
4. Sistematika Penyajian Lakip

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan juga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pada gilirannya diharapkan agar upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Masyarakat dalam melaksanakan peran dan fungsi sosialnya. Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Manggarai, komitmen pembangunan kesejahteraan sosial tersebut telah menjadi agenda utama pembangunan tahun 2016-2021, dengan strategis mencegah timbulnya Masalah Kesejahteraan Sosial dan Memberikan Pelayanan Sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan juga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dengan arah kebijakan meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap PMKS dan terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Agenda utama pembangunan daerah tersebut sesungguhnya merupakan respon atas permasalahan kemiskinan yang masih cukup tinggi termasuk didalamnya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.

Untuk merealisasikan agenda strategis tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD 2021-2026 juga Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai maka Dinas Sosial Kabupaten Manggarai menyelenggarakan pembangunan yang bertujuan pada Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan mencakup Program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bantuan Sosial.

I. DATA UMUM ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai maka Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri dari:

- a) Bidang Pemberdayaan Sosial
- b) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d) Bidang Bantuan Sosial

Secara umum, capaian hasil pembangunan kesejahteraan sosial menunjukkan perkembangan yang baik, dalam artian bahwa capain pada tahun 2024 Dinas Sosial menetapkan

target penanganan PMKS sebanyak **18.059** orang, meskipun realisasi penanganan PMKS ini hanya mencapai **5.351** orang atau **0,29%** dari target persentase yang ditetapkan sebesar **3,1%**. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan jumlah korban Bencana Alam maupun Bencana Sosial yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai. Hasil ini secara tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan serta penurunan angka Disparitas Wilayah.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang sasarannya diarahkan kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial yang sebaik-baiknya serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang sebaik-baiknya dalam upaya menciptakan suatu kondisi tata kehidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, sehingga memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya secara layak bagi individu, keluarga maupun masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi: Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan situasi dan kondisi politik di Indonesia, serta perkembangan masyarakat secara global dan Pembangunan yang kurang optimal, berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya bahkan mengarah kepada masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

Sementara peran serta masyarakat yang diharapkan turut serta bekerjasama sebagai mitra kerja Pemerintah dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial, pada kenyataan dewasa ini belum memperlihatkan perkembangan hasil yang optimal sebagaimana diharapkan sesuai keberadaan dan peranannya sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai yang bertugas membantu Bupati melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial. Untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu "**MANGGARAI MAJU, ADIL, DAN BERDAYA SAING**" dalam lima tahun kedepan, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai harus berperan aktif dengan mengemban misi pertama, yaitu "**Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia**"

Sebagai sebuah Perangkat Daerah Dinas Sosial juga wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah, daerah,

kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial selama Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata persentase capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sbb :

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	96,06%
	Rata-rata	96,06%
	KATEGORI	BAIK

II. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI / PERAN ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Manggarai, periode 2021-2026 difokuskan pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai melalui Agenda Pokok Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang ditetapkan sebagai Kebijakan Program Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan terdapat berbagai jenis tantangan yang harus dihadapi antara lain permasalahan di bidang sosial masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana.

Oleh sebab itu diperlukan penanganan permasalahan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pokok, indikator kinerja dan dukungan sumber daya yang lebih jelas agar hasil penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih terukur kontribusinya dalam pembangunan nasional maupun daerah.

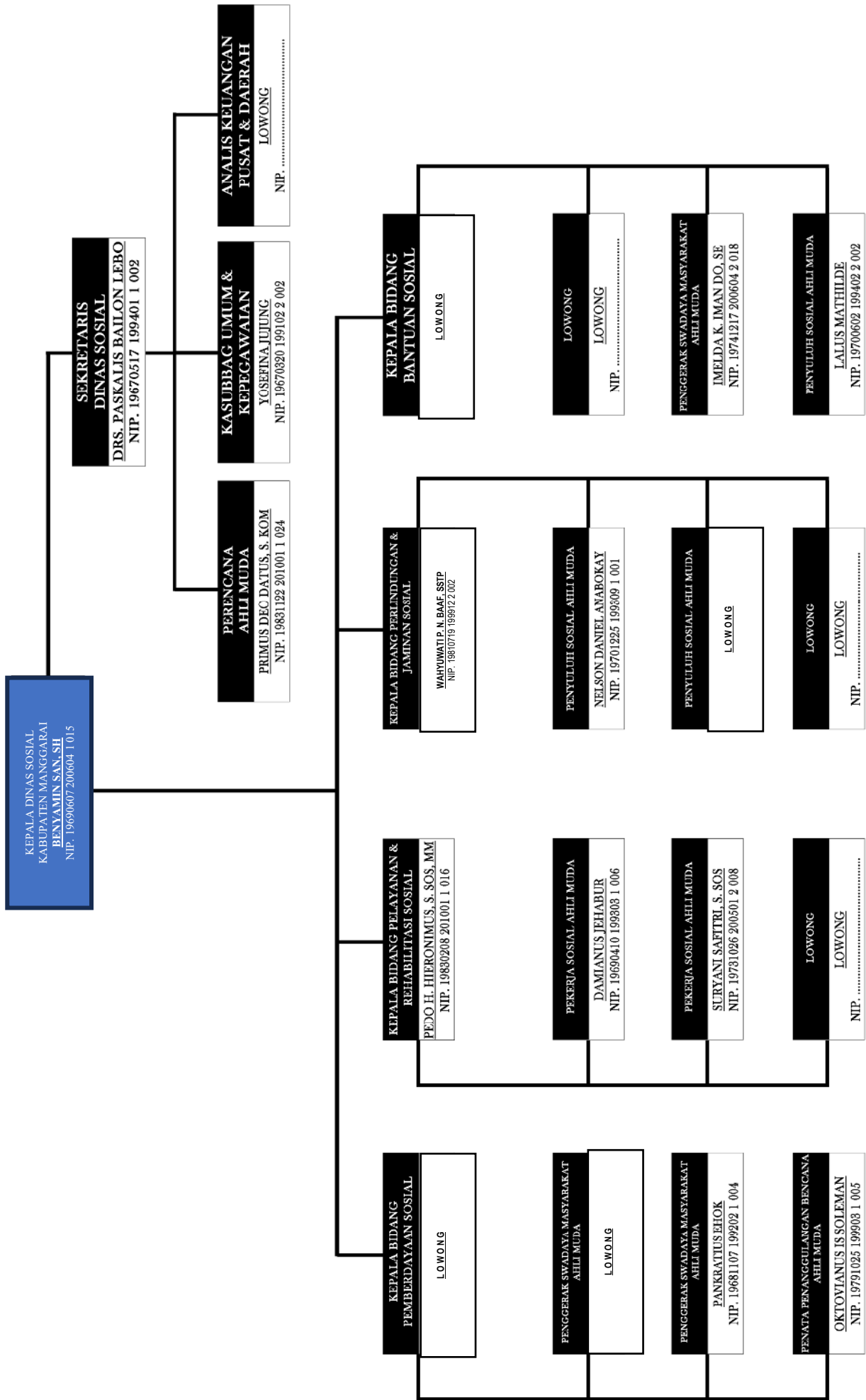
Seluruh aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial diarahkan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, sehingga secara terukur telah membangun landasan yang kondusif menuju terwujudnya masyarakat pada umumnya. Keberhasilan yang telah dicapai dalam perjalanan historis penyelenggaraan pemerintahan dibidang sosial akan membawa implikasi positif terhadap tingkat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan kedepan. Tantangan yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial ekonomi sebagian besar penduduk khususnya di Kabupaten Manggarai, masih rendahnya daya dorong perekonomian serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi beban sosial baik dari jumlah PMKS maupun keterbatasan dana untuk mengintervensi PMKS.

III. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Struktur Organisasi Dinas Sosial Terlampir

IV. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP :

- BAB I : Pendahuluan yang memuat : Latar Belakang, Data Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian
- BAB II : Perencanaan Kinerja yang memuat Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- BAB III : Akuntabilitas kinerja yang memuat, Uraian Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Sasaran, Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya dan Realisasi Keuangan
- BAB IV : Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI

Pembangunan pada hakekatnya merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat. Pada arus lokal, pemberdayaan masyarakat berarti pengembangan potensi yang ada dan dimiliki masyarakat untuk mencapai keadaan sejahtera. Untuk itulah perumusan visi yang jelas sangat penting peranannya bagi sukses tidaknya program pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Manggarai, Visi Pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Manggarai untuk periode 2021-2026 adalah **“MANGGARAI MAJU, ADIL, DAN BERDAYA SAING”**. Rumusan visi RPJMD periode 2021-2026 memiliki keterkaitan secara substansi maupun kata dengan Visi RPJPD. **ADIL** merupakan rumusan pokok visi yang memiliki persamaan dengan visi RPJPD, sedangkan **MAJU** dan **BERDAYA SAING** tidak terdapat di dalam visi RPJPD, namun tetap memiliki keterkaitan. Keterkaitan tersebut berupa harapan tentang kondisi daerah yang semakin maju dan berdaya saing di akhir periode pembangunan jangka panjang, sehingga mampu mencapai visi RPJPD makmur, sejahtera, adil, dan berkelanjutan di tahun 2026. Selain itu, visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 juga dioperasionalkan melalui jargon “Manggarai Mberes” yang artinya Manggarai Kuat. Hal tersebut merupakan bentuk operasionalisasi visi Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing melalui penguatan-penguatan pada sektor unggulan yang akan menjadi dasar penopang kekuatan Kabupaten Manggarai, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui jargon tersebut diharapkan kedepannya tiga sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masing-masing memiliki peran untuk menciptakan Kabupaten Manggarai yang maju dan kuat ketahanan ekonomi dan sumber daya manusianya.

B. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menggambarkan seluruh aspek umum pembangunan yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan Kabupaten Manggarai. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 sebagai berikut:

1. **MISI 1: MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA**
2. MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
3. MISI 3 : MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP
4. MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI

Permasalahan di bidang sosial di masa-masa yang akan datang masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana. Namun berbagai permasalahan yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial dan kesenjangan sosial perlu mendapat perhatian yang serius dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu diperlukan penanganan permasalahan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pokok, indikator kinerja dan dukungan sumber daya yang lebih jelas agar hasil penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih terukur kontribusinya dalam pembangunan nasional maupun daerah. Seluruh aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan di bidang sosial telah diarahkan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, sehingga secara terukur telah membangun landasan yang kondusif menuju terwujudnya masyarakat pada umumnya.

A. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM

TUJUAN
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

SASARAN
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

PROGRAM

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

B. ANALISIS SUMBER DAYA APARATUR

Pada Tahun 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang yang terdiri dari:

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	BENYAMIN SAN, SH NIP. 19690607 200604 1 015 Pembina, IV/a	KEPALA DINAS	S1
2	DRS. PASKALIS BAILON LEBO NIP. 19670517 199401 1 002 Pembina Tk. I, IV/b	SEKRETARIS	S1
3	PEDO H. HIERONIMUS, S. SOS, MM NIP. 19830208 201001 1 016 Pembina, IV/a	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	S2
4	WAHYUWATI P.N. BAAF, S.STP NIP. 19810719 199912 2 002 Pembina, IV/a	KEPALA BIDANG BANTUAN SOSIAL	S1
5	IMELDA K. IMAN DO, SE NIP. 19741217 200604 2 018 Penata Tingkat I, III/d	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	S1
6	SURYANI SAFITRI, S.SOS NIP. 19731026 200501 2 008 Penata Tingkat I, III/d	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	S1
7	YOSEFINA JUJUNG NIP. 19670320 199102 2 002 Penata Tingkat I, III/d	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
8	NELSON DANIEL ANABOKAY NIP. 19701225 199309 1 001 Penata Tingkat I, III/d	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA	S1
9	LALUS MATHILDE NIP. 19700602 199402 2 002 Penata Tingkat I, III/d	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA	SLTA
10	PRIMUS DEO DATUS, S.KOM NIP. 19831122 201001 1 024 Penata Tingkat I, III/d	PERENCANA AHLI MUDA	S1
11	OKTOVIANUS IS SOLEMAN NIP. 19791025 199903 1 005 Penata, III/c	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA	SLTA
12	PANKRATIUS EHOK NIP. 19681107 199202 1 004 Penata Tingkat I, III/d	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	SLTA
13	DAMIANUS JEHABUR NIP. 19690410 199303 1 006 Penata Tingkat I, III/d	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	SLTA
14	YUSTINUS SUHARDEDDY, S.SOS NIP. 19870601 202202 1 001 Penata Muda, III/a	PELAKSANA	S1
15	MAKARIUS IWANDI JEDARU, S.SOS NIP. 19950310 202202 1 001 Penata Muda, III/a	PELAKSANA	S1
16	HERMAN YOSEF MANEHAT, S. PD NIP. 19680407 199903 1 077 Pembina, IV/a	PELAKSANA	S1
17	ANSELMUS PERI NIP. 19720421 200701 1 024 Pengatur, II/c	PELAKSANA	SLTA
18	WILFRIDUS DALSON LAGUR NIP. 19760318 201406 1 001 Pengatur Muda Tingkat I, II/b	PELAKSANA	SLTA
19	AGUSTINUS WORO NIP. 19670101 200901 1 003 Pengatur Muda, II/a	PELAKSANA	SLTA
20	AMANDUS LEONJUN LUBIS NIP. 19861215 201212 1 003 Pengatur Muda, II/a	PELAKSANA	SLTA
21	SUTRISNO NIP. 19831126 201212 1 004 Pengatur Muda, II/a	PELAKSANA	SLTA
22	ADRIANUS SEPTIANUS NIP. 19801218 200903 1 006 Juru, I/c	PELAKSANA	SD

Dengan komposisi jabatan sebagai berikut:

	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	KEPALA DINAS	ESELON II	1 ORANG
2.	SEKRETARIS	ESELON III/A	1 ORANG
3.	KEPALA BIDANG	ESELON III/B	2 ORANG

JABATAN		ESELON	JUMLAH
4.	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	ESELON IV/A	1 ORANG
5.	FUNGSIONAL (SETARA ESELON IV)	-	9 ORANG
6.	FUNGSIONAL (STAF)	-	9 ORANG

Dengan komposisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN			
		S2	S1/D-IV	D-III	SLTA
1.	KEPALA DINAS	-	1	-	-
2.	SEKRETARIS	-	1	-	-
3.	KEPALA BIDANG	1	1	-	-
4.	KEPALA SUB BAGIAN	-	-	-	1
	FUNGSIONAL (SETARA ESELON IV)	-	5	-	4
	FUNGSIONAL (STAF)	-	2	-	7

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Dengan metode penyusunan seperti ini diharapkan Rencana Kinerja Tahunan selama 5 tahun dapat menjawab permasalahan yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat Manggarai, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial.

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
TUJUAN: MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	ANGKA	17.589
SASARAN: MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	PERSENTASE	4,09%

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Setiap sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program tergabung sejumlah kegiatan yang memiliki

kesamaan perspektif dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Perencanaan kinerja tahunan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi penyelenggaraan manajemen yang baik, karena rencana kinerja menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan dapat menjadi tolok ukur bagi organisasi/PD mencapai keberhasilan atau kegagalan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. ***(Perjanjian Kinerja terlampir)***

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai adalah bentuk tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Manggarai terkait keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Didalam bagian ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi pengukuran kinerja termasuk juga uraian sistematis tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala tersebut.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan setelah dilakukan penetapan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi variabel masukan (*input*), variabel keluaran (*output*), dan variabel hasil (*outcome*). Hasil pengukuran kinerja dianalisis untuk menemukan alasan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Manggarai. Poin penting dari hasil pengukuran tersebut adalah memberikan umpan balik bagi upaya memelihara keberhasilan dan perbaikan kinerja kedepan jikalau ditemukan kegagalan dengan pelbagai permasalahannya.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dari program dan kegiatan, maka capaian dimaksud dibagi dalam 5 (lima) kategori seperti berikut :

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.
$x \leq 60\%$	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manggarai. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Kinerja Tahunan 2023 untuk mencapai sasaran strategis RPJMD.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	98,64%
	Rata-rata	98,64%
	KATEGORI	BAIK

Sedangkan pada **Tahun 2024**, hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial adalah:

No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Kinerja
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	96,06%
	Rata-rata	96,06%
	Kategori	BAIK

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (**jasmani, rohani, dan sosial**) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, tentang Jenis, Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dan 12 PSKS, dengan batasan pengertian dan kriteria. Dalam ruang lingkup intervensi Program dan Kegiatan di tingkat Dinas Sosial Kabupaten Manggarai ada 6 jenis PMKS dan 1 jenis PSKS, dengan uraian sebagai berikut :

A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
- Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda;

2. **Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- Tidak ada keluarga yang mengurusnya;
- Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya;

- Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya;
 - Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin;
3. **Korban Bencana Alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- Korban terluka atau meninggal;
 - Kerugian harta benda;
 - dampak psikologis; dan
 - terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
4. **Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Kriteria :

- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
 - korban jiwa manusia;
 - kerugian harta benda; dan
 - dampak psikologis.
5. **Wanita Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- Perempuan berusia 18 – 59 tahun;
 - Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
 - Menjadi pencari nafkah utama keluarga;
 - Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. (cek istilah BPS);
6. **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

B. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. **Karang Taruna** adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- keanggotaannya bersifat stelsel pasif.

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Manggarai relatif kecil/terbatas, dimana intervensi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan fungsi sosial PMKS dan PSKS juga rendah sedangkan jumlah PMKS dan PSKS yang seharusnya dibantu jumlahnya cukup banyak.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Indikator persentase **Lanjut Usia Terlantar** dan **Penyandang Disabilitas Terlantar** yang dibantu.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 513.260.000,-**, sedangkan realisasinya sebesar **Rp 508.179.361,-** atau **99,01%**. Anggaran ini dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar/pokok berupa sembako bagi Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Terlantar, kemudian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas Terlantar.

2. Indikator persentase **Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi**.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Pemberdayaan Sosial. Kegiatan **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran untuk mendukung indikator ini adalah **Rp 10.390.000,-** sedangkan realisasinya sebesar **Rp 10.270.021,-** atau **98,85%**. Anggaran ini dimanfaatkan untuk Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi melalui bantuan Perlengkapan Alat Tata Rias Pemula.

3. Indikator persentase **Pemberdayaan Karang Taruna**.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Pemberdayaan Sosial. Kegiatan **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran untuk mendukung indikator ini adalah **Rp 11.305.000,-** sedangkan realisasinya sebesar **Rp 11.183.556,-** atau **98,83%**. Anggaran ini

dimanfaatkan untuk Pemberdayaan Karang Taruna melalui bantuan Perlengkapan Alat Pengolahan Ban Bekas.

4. Indikator **Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial**.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Penanganan Bencana. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran untuk mendukung indikator ini adalah **Rp 13.200.000,-** sedangkan realisasinya sebesar **Rp 11.350.000,-** atau **85,98%**. Anggaran ini dimanfaatkan untuk bantuan beras bagi Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Manggarai sepanjang Tahun 2024.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Target dan Realisasi Belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 2.717.617.650,-** dan realisasi sebesar **2.610.424.094,-** atau sebesar **96,06%**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	Rp 2.717.617.650	Rp 2.610.424.094	96,06%
- Belanja Pegawai	Rp 1.938.690.329	Rp 1.887.527.606	97,36%
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 778.927.321	Rp 722.896.488	92,81%
TOTAL	Rp 2.717.617.650	Rp 2.610.424.094	96,06%

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	Rp 2.618.454.444	Rp 2.383.192.105	91,02%
- Belanja Pegawai	Rp 2.287.428.760	Rp 2.057.532.674	89,95%
- Belanja Barang	Rp 331.025.684	Rp 325.659.431	98,38%
TOTAL	Rp 2.618.454.444	Rp 2.383.192.105	91,02%

Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUPUT)	TARGET KINEJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2024) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN RELIASASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI(%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		
DINAS SOSIAL			Rp 2.717.617.650		Rp 2.610.424.094		96,06%		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN RUTIN PEMERINTAH YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR	98	PERSEN	Rp 2.139.327.650	98	Rp 2.044.931.156	100	95,59%
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	DOKUMEN	Rp 2.319.000	2	Rp 2.100.000	100	90,56%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	DOKUMEN	Rp 1.123.000	2	Rp 1.050.000	100	93,50%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	LAPORAN	Rp 1.196.000	1	Rp 1.050.000	100	87,79%
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	DOKUMEN	Rp 1.967.564.491	2	Rp 1.915.065.928	100	97,33%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 (30x14)	ORANG	Rp 1.920.190.329	420 (30x14)	Rp 1.869.727.606	100	97,37%
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	DOKUMEN	Rp 47.374.162	10	Rp 45.338.322	100	95,70%
	3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	DOKUMEN	Rp 43.500.000	3	Rp 35.367.378	100	81,30%
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	UNIT	Rp 33.500.000	14	Rp 31.592.378	100	94,31%
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	UNIT	Rp 5.000.000	10	Rp 2.500.000	100	50%
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	UNIT	Rp 5.000.000	1	Rp 1.275.000	100	25,50%
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	DOKUMEN	Rp 21.800.000	2	Rp 10.986.900	100	50,40%
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	LAPORAN	Rp 800.000	1	Rp 251.000	100	31,38%
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	LAPORAN	Rp 21.000.000	3	Rp 10.735.900	100	51,12%
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	DOKUMEN	Rp 104.144.159	6	Rp 81.410.950	100	78,17%
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	PAKET	Rp 2.020.000	1	Rp 2.020.000	100	100%
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	PAKET	Rp 49,673,159.00	1	Rp 45,401,150.00	100	91,40%
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	PAKET	Rp 10,500,000.00	1	Rp 945,000.00	100	9%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUPUT)	TARGET KINEJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2024) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN RELIASASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI(%)	
			4			5		6	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	PAKET	Rp 9,330,000.00	1	Rp 9,269,800.00	100	99,35%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	DOKUMEN	Rp -	0	Rp -	0	0%
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	PAKET	Rp 1,816,000.00	1	Rp 635,000.00	100	34,97%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	LAPORAN	Rp 30,805,000.00	1	Rp 23,140,000.00	100	75,12%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL	83	PERSEN	Rp 21,695,000.00	83	Rp 21,453,577.00	100	98,89%
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2	DOKUMEN	Rp 21,695,000.00	2	Rp 21,453,577.00	100	98,89%
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	KELUARGA	Rp 10,390,000.00	3	Rp 10,270,021.00	100	98,85%
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	LEMBAGA	Rp 11,305,000.00	3	Rp 11,183,556.00	100	98,83%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG BERDAYA	86	PERSEN	Rp 517,395,000.00	86	Rp 509,689,361.00	100	98,51%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Dokumen Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3	DOKUMEN	Rp 513,260,000.00	3	Rp 508,179,361.00	100	99,01%
1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3	ORANG	Rp 6,385,000.00	3	Rp 5,994,111.00	100	93,88%
2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	ORANG	Rp 6,875,000.00	2	Rp 5,999,550.00	100	87,27%
3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	236	ORANG	Rp 500,000,000.00	236	Rp 496,185,700.00	100	99,24%
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Dokumen Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1	DOKUMEN	Rp 4,135,000.00	1	Rp 1,510,000.00	100	36,52%
1	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2	DOKUMEN	Rp 4,135,000.00	2	Rp 1,510,000.00	100	36,52%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE DESA YANG MEMILIKI DATA PMKS YANG TERVALIDASI	100	PERSEN	Rp 26,000,000.00	100	Rp 23,000,000.00	100	88,46%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUPUT)	TARGET KINEJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2024) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN RELIASASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI(%)	
			4			5		6	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1			2	DOKUMEN	Rp 26,000,000.00	2	Rp 23,000,000.00	100	88,46%
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	42.379	ORANG	Rp 20,115,000.00	42.379	Rp 17,750,000.00	100	88,24%
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	61.589	KELUARGA	Rp 5,885,000.00	61.589	Rp 5,250,000.00	100	89,21%
5		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100	PERSEN	Rp 13,200,000.00	100	Rp 11,350,000.00	100	85,98%
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	DOKUMEN	Rp 13,200,000.00	1	Rp 11,350,000.00	100	85,98%
	1	Pelayanan Dukungan Psikososial	15.000	ORANG	Rp 13,200,000.00	5.104	Rp 11,350,000.00	34%	85,98%

Bab IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dapat dikatakan berhasil mencapai target. Persentasi rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2024 adalah **96,06%**.

2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang adalah :

- Prioritas dan efisiensi anggaran, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan masalah Kesejahteraan Sosial;
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

3. URAIAN RINGKAS MASALAH YANG DIHADAPI DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Secara umum masalah/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2024, adalah masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial apabila dikaitkan dengan luasnya jangkauan pelayanan sosial yang sangat kompleks.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan:

- Menerapkan skala prioritas pelaksanaan program/kegiatan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada dilapangan;
- Alokasi anggaran yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan.

Ruteng, 20 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai,



BENYAMIN SAN, SH

PEMBINA

NIP. 19690607 200604 1 015